



Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Yokki Kurnia Perdana¹, Dhani Akbar², Ryan Anggria Pratama³

^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang,

Kepulauan Riau 29115; Telepon: (0771) 4500089

Email Korespondensi: yokkikurniaperdana@gmail.com

Abstract

Poverty is one of the major issues currently being faced by the Indonesian nation. The problem of poverty will never end if traced from the root of the problem. Poverty is not only an interesting issue to be discussed at the national level, but at the regional level itself, the poverty of this community seems to spread throughout the country, for example in Tanjungpinang City, where the poverty rate is high, even though Tanjungpinang City is the provincial capital. Various efforts and efforts have been made by related parties to reduce the poverty rate, but what is happening in the field is that the poverty rate is actually increasing. Starting from BLT assistance, PKH to BPNT, the local government has launched it in collaboration with related agencies, namely the Social Service. In this study, the researchers wanted to examine one of the aids, namely Non-Cash Food Assistance (BPNT), which is routinely carried out from 2018-present. Researchers want to know more about how this assistance is implemented, starting from the weaknesses to the advantages that arise from this assistance and what the consequences are for the poverty rate. Talking about the poverty rate cannot be separated from sustainable development or often referred to as the SDGs, where the first point of the SDGs is No Poverty (Without Poverty) whose target must be achieved by 2030. This study used a qualitative descriptive method, with 7 (seven) informants. In this study the techniques used were interviews and documentation. The theory used in this study uses the theory of Van Metter and Van Horn. The results of the study found that the implementation of the poverty alleviation policy through BPNT was quite good, but it is undeniable that there are still deficiencies that must be addressed, especially in determining the beneficiaries who receive this assistance, which often occurs miscommunication or mis-data between events that actually occur in the field. data received by related parties. Not only that, in the last few months the distribution has been changed from a system of buying food to cash which is disbursed directly through an ATM, of course this is a decision that must be reviewed again from the original purpose of this policy.

Keywords: Poverty, BPNT, Sustainable Development Goals (SDGs)

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu isu besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Masalah kemiskinan tidak akan pernah habis jika dirunut dari akar permasalahannya. Kemiskinan bukan hanya menjadi isu yang menarik untuk dibahas di tingkat nasional namun di tingkat daerah sendiri kemiskinan masyarakat ini seakan menjalar keseluruh pelosok negeri sebagai contoh di Kota Tanjungpinang ini yang mana angka kemiskinannya termasuk tinggi padahal Kota Tanjungpinang merupakan ibukota provinsi. Berbagai daya dan Upaya telah dilakukan oleh pihak terkait untuk memangkas angka kemiskinan. Namun, yang terjadi di lapangan angka kemiskinan justru semakin naik. Mulai dari bantuan BLT, PKH hingga BPNT sudah diluncurkan pemerintah setempat bekerjasama dengan dinas terkait yaitu Dinas Sosial. Pada penelitian kali ini peneliti ingin meneliti tentang salah satu bantuan yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mana bantuan ini rutin dilaksanakan mulai dari tahun 2018-sekarang. Peneliti ingin tahu lebih lanjut bagaimana pengimplementasian bantuan ini mulai dari kelemahan hingga kelebihan apa saja yang timbul dari bantuan ini dan apa akibatnya terhadap angka kemiskinan. Berbicara angka kemiskinan tidak terlepas juga dari pembangunan berkelanjutan atau sering disebut dengan SDGs, yang mana pada poin pertama dari SDGs ini yaitu No Poverty (Tanpa

Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)

Kemiskinan) yang targetnya harus dicapai pada tahun 2030 mendatang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan 7 (tujuh) orang informan. Dalam penelitian ini Teknik yang digunakan yaitu, berupa wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn. Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui BPNT ini sudah cukup baik, namun tidak dapat dipungkiri masih adanya kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi terutama dalam penentuan KPM yang menerima bantuan ini, yang sering terjadi miskomunikasi ataupun mis-data antara kejadian yang sebenarnya terjadi dilapangan terhadap data yang diterima oleh pihak terkait. Tidak hanya itu dalam beberapa bulan terakhir penyaluran diubah dari sistem pembelian bahan pangan menjadi uang tunai yang dicairkan langsung melalui ATM tentu ini menjadi suatu keputusan yang harus ditelaah kembali dari tujuan awal dicetuskannya kebijakan ini.

Kata Kunci: Kemiskinan, BPNT, Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

PENDAHULUAN

Sulistiyani (Pairan, 2015 : 294) menyatakan bahwa kemiskinan secara ekplisit merupakan selaku fenomena, hendak melihat bagaimana upaya warga dalam memenuhi kebutuhan, serta hingga sejauh mana upaya tersebut sanggup mencapai apa yang di idamkan. Nuansa penanggulangan kemiskinan sepanjang ini masih sangat diwarnai oleh pemikiran semacam ini. Oleh sebab itu, banyak program pengentasan kemiskinan cuma terfokus pada bagaimana keahlian warga dalam memenuhi kebutuhannya, bukan mencari jalur keluar buat meringankan beban kemiskinan dengan lewat usaha tingkatkan keahlian secara bertahap. Maka dari itu, diperlukannya terobosan-terobosan baru agar penanggungan kemiskinan di akan lebih optimal dan bisa menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi hingga saat ini.

Eko Suharto (Hafsah, 2008) mengatakan bahwa konsep kemiskinan didominasi oleh satu sudut pandang, yakni “kemiskinan pendapatan” Yang mana pemahaman semacam ini di kritik Sebagian besar pakar. Sebab, tidak bisa menggambarkan potret kemiskinan secara utuh. Sedangkan, seperti yang kita ketahui kemiskinan menimbulkan dampak yang banyak ke dalam segala bidang (Djaenal, 2021).

Sedangkan menurut sosiolog E.J. Habsbown (Hafsah, 2008) kemiskinan merupakan “*Poverty has always had several not entirely severable meaning and is always defined according to the conventions of the society in which it occurs.*” Yang berarti kemiskinan itu tidak selalu diartikan dengan kemiskinan itu sendiri, akan tetapi dapat digambarkan menurut apa yang terjadi di masyarakat. Dalam pasal 1 Peraturan Presiden No 166 tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Seperti yang kita ketahui data terakhir melalui sensus penduduk BPS tahun 2020 bahwa jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang ini berjumlah sekitar 227.663 jiwa, dapat dilihat pada tabel di bawah, yang mana tersebar dalam 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Bukit Bestari,

Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Tanjungpinang Kota, dan Kecamatan Tanjungpinang Barat.

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang

Kecamatan	Jumlah Penduduk di Kota Tanjungpinang tahun 2021	
	Bukit Bestari	54.599
Tanjungpinang Timur	114.875	
Tanjungpinang Kota	19.512	
Tanjungpinang Barat	44.381	
Kota Tanjungpinang	233.367	

Sumber (BPS Kota Tanjungpinang)

Selain itu, kita ketahui Bersama dan bisa kita lihat data dari BPS Kota Tanjungpinang bahwa angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Data terbaru yang diambil dari tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungpinang terus mengalami peningkatan, walaupun tidak signifikan tapi peningkatan ini jika lama kelamaan di biarkan juga akan menjadi peningkatan yang berakhir dengan kekhawatiran bahwa pemerintah setempat dan dinas terkait gagal dalam melaksanakan peran dan fungsi dalam menjalankan program-programnya. Jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungpinang serta Kabupaten/Kota lainnya di Kepulauan Riau dapat diamati pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Data Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau (Dalam Jiwa)

Kepulauan Riau	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
	2021	2020	2019
Provinsi Kepulauan Riau	144.46	131.97	128.46
Kabupaten Karimun	16.28	15.99	15.36
Kabupaten Bintan	10.54	10.21	10.14
Kabupaten Natuna	3.98	3.47	3.43
Kabupaten Lingga	12.58	12.45	11.56
Kabupaten Kepulauan Anambas	3.08	2.8	2.72
Kota Batam	77.17	67.06	66.21
Kota Tanjungpinang	20.85	19.98	19.05

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang

Pada tabel berikutnya, dapat diperoleh informasi bahwasannya dari segi persentase penduduk miskin dengan seluruh penduduk yang ada di Kota Tanjungpinang juga mengalami kenaikan. Dapat dilihat pada tabel bahwa pada 3 tahun terakhir persentase penduduk miskin berada di angka 9% dari keseluruhan penduduk di Kota Tanjungpinang. Walaupun kenaikannya

Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)

tidak terlalu signifikan, namun harus tetap menjadi fokus utamanya ialah data ini harus turun ditahun berikutnya.

Selain data di atas, terdapat juga data-data lainnya tentang kemiskinan di Kota Tanjungpinang seperti berikut ini :

Tabel 3. Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Tanjungpinang (2017-2021)

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	598.631	19,19	9,29
2018	625.473	19,29	9,24
2019	659.170	19,05	9,03
2020	691.738	19,98	9,37
2021	719.776	20,85	9,57

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang (Tanjungpinang dalam angka 2022)

Dapat dilihat dari data di atas bahwasannya, data jumlah penduduk miskin serta persentasenya di Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan terkhusus untuk lima tahun terakhir begitu pula garis kemiskinan yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Selain data tersebut juga terdaapt data lain yang berkaitan dengan kemiskinan di Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel 4. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang (2017-2021)

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahhan kemiskinan
(1)	(2)	(3)
2017	1,76	0,48
2018	1,49	0,38
2019	1,15	0,23
2020	1,58	0,40
2021	1,75	0,52

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang (Tanjungpinang dalam angka 2022)

Dalam hal indeks kedalaman kemiskinan dapat diartikan sebagai berikut : Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan (Bhayu at el, 2020).

Dalam hal indeks keparahan kemiskinan dapat diartikan sebaagi berikut: Indeks Keparahhan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai

penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin (Anwar et al, 2020)

Seperti yang kita ketahui Bersama kota Tanjungpinang merupakan sendiri merupakan ibukota provinsi Kepulauan Riau, oleh karena itu kota Tanjungpinang harus bisa menjadi contoh bagi kota/kabupaten lainnya yang ada di provinsi Kepulauan Riau, dengan terus bertambahnya angka kemiskinan tentu saja membuat image ibukota yang melekat di Tanjungpinang akan tercoreng semakin tinggi pula angka kemiskinan tentu saja menggambarkan banyak masalah kesejahteraan sosial yang masih di alami kota Tanjungpinang itu sendiri, oleh karena itu perlu adanya Langkah konkret dengan memperbanyak program-program pengentasan kemiskinan, yang salah satunya seperti yang kita ketahui berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

Tujuan pembangunan nasional salah satunya membahas tentang kesejahteraan rakyat. buat itu dibutuhkan langkah-langkah yg kongkrit agar tujuan tersebut bisa tercapai. Langkah-langkah kongkrit tadi tercermin di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 129/HUK/2008 ihwal standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial daerah Provinsi serta wilayah Kabupaten/Kota, artinya menjadi ketentuan tentang jenis serta mutu pelayanan dasar bidang sosial yg termasuk didalamnya urusan daerah yang berhak diperoleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara aporisma. PMKS yg dimaksud adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Dari data diatas Fakir miskin termasuk ke dalam program dan juga tanggungjawab dari Pemerintah setempat yang dilimpahkan kepada Dinas terkait yaitu salah satunya dalam hal ini Dinas Sosial. Oleh karena itu, Dinas Sosial juga menjadi salah satu dinas yang bertanggungjawab untuk menurunkan angka kemiskinan dengan kebijakan dan program-program yang mereka buat. Dari permasalahan dan fenomena diatas penulis tertarik melakukan penelitian untuk dijadikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang Melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs)”**

Berdasarkan latar belakang yang diteliti oleh peneliti, Bagaimanakah Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungpinang melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai upaya mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2022. Dengan tujuan penelitian, Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang bagaimana implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungpinang melalui

Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)

program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai upaya mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2022

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif deskriptif dari Creswell (Dzulqarnain et al., 2022). Objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah pengimplementasian program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Tanjungpinang. Sumber data yang dilakukan peneliti ialah secara primer dan sekunder. Dengan Teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tidak hanya itu, penelitian ini juga melakukan teknik analisis data secara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016 : 246).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sendiri berawal dari arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Widodo pada rapat terbatas tentang Program Raskin pada Juli 2016, penyaluran Raskin diganti dengan menggunakan kartu elektronik yang akan diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran, sehingga bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Namun pada tahun 2019 Permensos ini di ganti lagi menjadi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang mana peraturan ini dipakai hingga sekarang.

Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku sehingga rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein, seperti telur. Selain itu, penyaluran

bantuan sosial non tunai juga dapat membiasakan masyarakat untuk menabung karena pencairan dana bantuan dapat mereka atur sendiri sesuai kebutuhan. Untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai ini, diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Dari situ, calon KPM akan mendapat surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan. Data yang telah diisi oleh calon penerima program ini lalu diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kantor kelurahan dan kantor walikota/ kabupaten. Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan. Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS. E-warong adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pencairan/penukaran/pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), agen bank yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. KPM dapat membeli bahan pangan sesuai kebutuhan pada e-warong yang memiliki tanda lokasi penyaluran bantuan sosial non tunai. Transaksi dilakukan secara non tunai mengacu pada jumlah saldo yang tersimpan pada chip KKS. Lewat sistem yang terhubung dengan perbankan ini, penyalur bantuan akan mendapatkan laporan rinci seputar jumlah dana yang telah disalurkan, jumlah dana yang ditarik oleh penerima, jumlah dana yang tersisa dan berapa orang penerima yang belum menarik bantuan pangannya.

Penyaluran bantuan pangan secara non tunai lewat BPNT mengacu pada 4 (empat) prinsip umum, yaitu:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.
2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan. Juga termasuk kebebasan memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini.
3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari BPNT secara umum, yaitu:

Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatnya transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia.
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Di Kota Tanjungpinang program Bantuan Pangan Non Tunai ini juga sudah dimulai sejak tahun 2018 hingga sekarang. Dimana dasar hukumnya jelas yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, yang mana Permensos ini diganti menjadi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Jika dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan (SDGs) program ini juga dicantumkan di dalam rencana strategis (renstra) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, yang mana dalam renstra tersebut berisi rencana kerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang selama lima tahun sejak 2018-2023.

Dalam hal ini peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Model ini dipilih karena variabel-variabel dari model implementasi ini dapat menjelaskan secara komprehensif tentang proses implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungpinang melalui program BPNT ini. Adapun variabel-variabel dari model implementasi ini adalah standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

A. Analisis Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Dalam indikator yang pertama ini, kinerja dari implementasi kebijakan dapat diukur taraf keberhasilannya, apabila sesuai dengan yang terjadi di lapangan dan sesuai dengan tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut. Perlu adanya kesesuaian antar indikator-indikator yang ada dengan proses pengimplementasian kebijakan tersebut di lapangan. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait variabel dari elemen pertama ini peneliti sudah mewawancarai beberapa informan untuk mendapat hasil yang kredibel dan akurat.

Dalam pemaparan pertama ini, peneliti lebih menekankan kepada untuk siapa kebijakan ini buat. Apakah sudah efisien atau tidak. Apakah sudah tepat sasaran atau tidak.

B. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu indikator yang tidak kalah penting dibanding indikator yang lain dalam menentukan keberhasilan suatu program. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Diluar dari sumber daya manusia, berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan juga ditentukan oleh sumber daya lainnya yaitu, sumber daya finansial dan waktu.

C. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Hal berikutnya yang harus diperhatikan dalam pengimplementasian kebijakan ialah karakteristik agen pelaksana. Baik itu Lembaga formal maupun Lembaga non-formal yang terlibat. Karena kebijakan yang diambil atau diputuskan berpusat pada agen-agen tersebut.

D. Sikap Para Pelaksana

Sikap dari pelaksana kebijakan juga mempengaruhi jalannya suatu implementasi kebijakan, serta sukses atau tidaknya kebijakan tersebut. Hal ini bisa saja terjadi dalam sebuah kebijakan dikarenakan hal-hal yang terjadi di lapangan tidak dirasa langsung oleh pembuat kebijakan dan juga tanpa mempertimbangkan masukan dari warga setempat. Tetapi melainkan kebijakan *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang terjadi.

Sikap dari pelaksana kebijakan yang baik adalah yang ingin mendengar keluhan kesah terkait permasalahan yang ada. Dalam hal ini ialah implementasi dari kebijakan penyaluran BPNT ini.

E. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi yang dilakukan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implmentasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi. Dalam konep ini, komunikasi antar Lembaga/organisasi pelaksana sangat penting untuk diperhatikan, agar tidak terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.

Hal ini tentu saja bisa berakibat buruk jika terjadi terus menerus. Alangkah baiknya jika pihak dinsos meninjau langsung KPM-KPM tersebut secara berkala agar data yang didapat

bisa akurat. Karena sering terjadi kejadian di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan atau data yang di terima oleh pihak dinsos sering berbeda dengan di lapangan.

F. Lingkungan Sosial, Ekonomi, Dan Politik

Hal terpenting lainnya yang harus dilihat guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam model ini ialah faktor lingkungan. Sejauh mana lingkungan luar turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi faktor kegagalan dari sebuah implementasi kebijakan yang sedang berlangsung.

Dari segi *Sustainable Development Goals* (SDGs) sendiri bantuan ini sangat cocok untuk mengurangi kemiskinan atau membantu masyarakat miskin mengurangi beban hidupnya. BPNT sendiri sudah adakan sejak tahun 2018 dan mulai optimal dilaksanakan sejak masa covid menjadi bantuan yang betul-betul menjadi prioritas dan sama halnya dengan PKH serta BLT. Dalam konsep SDGs keberlanjutan merupakan suatu keharusan agar target yang ingin dicapai dapat sesegera mungkin tercapai. Seperti pada SDGs poin 1 ini yang memiliki target menghapus kemiskinan pada tahun 2030, kalau bisa lebih cepat daripada itu. Maka dari itu pemerintah melalui dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial ataupun Kementerian Sosial mengeluarkan kebijakan dalam bentuk bantuan-bantuan kesejahteraan sosial, yang mana salah satunya Bantuan Pangan Non Tunai ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti paparkan pada bab 4 mengenai implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai upaya mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sesuai data angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang sejak tahun 2018-2023 terus mengalami kenaikan, itu artinya bantuan-bantuan yang dikeluarkan pemerintah Kota Tanjungpinang belum maksimal, salah satunya ialah melalui program BPNT ini. Maka dari itu, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dari indikator ini disimpulkan bahwa ukuran implementasi suatu kebijakan itu bisa dikatakan baik dapat dilihat dari 3 hal yaitu, jumlah orang yang terlibat atau terbantu dengan kebijakan ini, siapa saja yang orang-orang yang terlibat serta yang terakhir yaitu bagaimana kemajuan program tersebut. Untuk ukuran yang pertama yaitu jumlah orang yang terlibat cukup banyak mulai dari Dinas Sosial khususnya bidang yang menangani

masalah ini, kemudian dari pihak ketiga Bank BNI dan PT. POS selaku penyalur serta KPM-KPM yang sangat terbantu dengan adanya program ini. Kemudian orang-orang yang terlibat sudah dijelaskan diatas, serta yang terakhir bagaimana kemajuan atau perkembangan program ini. Program ini dimulai sejak tahun 2018 tapi baru betul-betul fokus dikembangkan lagi pada masa covid. Masalah yang terjadi di lapangan tetap sama yaitu ketidaksesuaian database yang diterima dinsos dengan kejadian yang di lapangan, padahal bantuan ini menyasar KPM miskin yang terdata di DTKS, tapi ketika di lapangan masih terdapat KPM yang tidak sesuai. Dan ini akan menjadi evaluasi ke depan bagi dinas sosial dan agen pelaksana.

2. Sumber Daya

Kemudian pada indikator yang kedua sumber daya. Sumber daya yang pertama yaitu manusia untuk KPM penerima BPNT hingga saat terus mengalami penurunan, hal ini dikarenakan kebijakan dari kementerian sosial di pusat. Dinas Sosial Tanjungpinang juga bingung terkait hal ini. Kemudian dari segi dana KPM hanya diberikan uang 200rb/bulan hal ini masih terlalu jauh dari bantuan-bantuan lainnya seperti BLT dan PKH. Besar harapan kami jumlah uang yang didapat akan bertambah. Dari segi waktu kami rasa tidak masalah karena diberikan sebulan sekali, walaupun di lapangan ketika penyaluran sering berubah-ubah dana adanya keterlambatan kadang sebulan sekali kadang bisa 3-6 bulan sekali waktu penyaluran.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Kemudian untuk indikator yang ketiga ini, saya rasa sudah cukup pas. Dimulai dari agen-agen yang terlibat semua sudah tahu tupoksi kerja masing-masing. Dinas sosial berfungsi untuk mengumpulkan data-data KPM yang berhak menerima bantuan ini yang mana data tersebut diajukan oleh RT, RW atau kelurahan setempat. Pendamping BPNT juga berfungsi sebagai sarana KPM untuk mencurahkan isi hati mereka terkait penyaluran bantuan ini, selain itu pendamping BPNT juga sebagai pengawas yang mengawasi setiap gerak-gerik yang tidak benar terkait bantuan ini. Kemudian bank BNI dan PT.POS sebagai agen penyalur sudah cukup baik.

4. Sikap/ Kecenderungan Disposisi Para Pelaksana

Kemudian indikator keempat terkait sikap disposisi para pelaksana kebijakan ini. Sikap yang diberikan para pelaksana sudah cukup baik. Dimulai dari dilakukannya survei lapangan atau peninjauan kembali dari data yang diberikan RT/RW. Kemudian ketika mendapat aduan dari masyarakat pihak dinsos juga menanggapi dan melakukan kebenaran yang terjadi.

Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana

Selanjutnya indikator kelima, pada indikator ini peneliti dapat simpulkan bahwa komunikasi yang terjadi antar organisasi/agen pelaksana yang terlibat sudah cukup baik.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Kemudian indikator yang terakhir terkait lingkungan ekonomi, sosial dan politik dapat disimpulkan juga tidak ada masalah. Semua yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lainnya.

SARAN

1. Untuk Dinas Sosial Tanjungpinang agar dapat memperbaiki database terkait KPM yang berhak menerima bantuan ini. Karena kejadian dilapangan banyak terdapat laporan banyak KPM yang tidak sesuai.
2. Untuk Dinas Sosial Tanjungpinang bisa menyarankan ke tingkat pusat agar bantuan ini terus berlanjut aagr lebih banyak orang terbantu.
3. Untuk Dinas Sosial Tanjungpinang bisa menyarankan ke tingkat pusat agar bantuan ini jumlahnya dinaikkan dari 200rb/bulan menjadi berapa sesuai kesepakatan.
4. Kemudian untuk masyarakat Kota Tanjungpinang agar tidak segan tidak malu melaporkan ke dinas sosial jika terdapat penyelewengan terkait bantuan ini yag dijumpai di lapangan.
5. Untuk masyarakat Kota Tanjungpinang kembali dihimbau jika namanya tidak terdata di DTKS sebagai penerima bantuan ini padahal dari segi ekonomi sangat layak mendapat bantuan segera melaporkan ke pihak terkait.

REFERENSI

- Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *Jurnal Respon Publik*, 14(3), 1–7.
- Bhayu Pratama, N., Priyo Purnomo, E., & Agustiyara. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Sosiohumaniora*, 6(2), 64–74.
- Djaenal, R., J. E. Kaawoan, & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2022). Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. *Professional*, 9(1), 109–116.
- Hafsah, M. J. (2008). *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan masyarakat* (1 ed.). Iris Press.

Pairan. (2015). Strategi Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal PKS*, 14(3), 293–304.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (23 ed.). Alfabeta.